

DAFTAR PUSTAKA

- DDTC, P. (2024). *Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan*. <https://perpajakan.ddtc.co.id/panduan-pajak/pajak-transaksi/tata-cara-pelaporan-spt-tahunan-pph-badan>
- DPR RI. (2023). *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangannya*. 1–165.
- Fitriya. (2024a). *Cara Bayar Pajak PPN Online di e-Billing*. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak-online-melalui-ebilling/>
- Fitriya. (2024a). *Pajak Penghasilan Pasal 25*. [https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25 /](https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/)
- Fitriya. (2024b). *Cara Lapor SPT Masa PPN Online*. <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-masa-ppn-online-terbaru-di-e-faktur/>
- Kementerian Keuangan. (2018). *PMK No 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan*.
- Kementerian, K. (2021). *Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. *Republik Indonesia*, 224.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Da. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360*.
- Lathifa, D. (2024). *Cara Bayar Pajak Tahunan Badan Terutang Setelah Lapor SPT Tahunan PPh di OnlinePajak*. <https://www.online-pajak.com/tips-efiling/cara-bayar-spt-tahunan-badan-di-onlinepajak>
- LPEM UI, Sidiq Suryo Nugroho, Futu Faturay, Sofia Arie Damayanty, Agung Kurniawan Purnomo Putro, Soni Rita Br Purba, Ditto Hadi Pratama, dan G. T. (2023). *Peta Jalan Kebijakan Perpajakan*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2023/12/27/2457-peta-jalan-kebijakan-perpajakan>
- Mardiasmo, MBA., AKT., QIA., CFaR., CA. (2019). *PERPAJAKAN* (2019th ed.). Penerbit Andi.
- Pajak, D. J. (2024). *Direktorat Jenderal Pajak Online*. <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015*

tentang Tata Cara Pemeriksaan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468*.

Republik Indonesia. (2007). UU No. 8 Tahun 2007. *Kementerian Keuangan*, 21(5–6), 508–516.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, 2013(021), 250–250.

Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN* (11, Ed.). Salemba Empat.

Suandy, E. (2019). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.

Sultony, A. (2022). *Pembetulan SPT Sehubungan dengan Wajib Pajak (Pasal 8 ayat (6) UU KUP)*.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Wirawan B. Ilyas, Ak., M.Si., MH., CPA. dan Pandu Wicaksono, SST., M. Acc. (2015). *Pemeriksaan Pajak* (2015 th ed.). Mitra Wacana Medi